



LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Batang

Nomor Registrasi: 33.25-13951-43858-2021

1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Lomba Pengelolaan JDIH Pemerintah Desa Tahun 2020

1.2. Dibuat Oleh

Sekretariat Daerah Kabupaten Batang (setda.batang)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Jenis Inovasi

Non Digital

1.6. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.7. Urusan Inovasi Daerah

Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Keberadaan sebuah wadah yang dapat menyajikan informasi hukum dan data produk hukum yang berlaku yang selalu diperbarui menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan, yang hal ini secara factual dan regulasi telah ada dengan adanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang terintegrasi dari tingkat pusat sampai daerah.

Tujuan dari JDIH sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 diantaranya adalah untuk menjamin keeresediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah. Ada pula tujuan lainnya yaitu untuk meningkatkan

kualitas pembangunan hukum nasional. Salah satu cara agar tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai adalah para anggota JDIH harus melakukan pengembangan terhadap unit JDIH yang dikelolanya.

Kehadiran JDIH bagi Pemerintah Desa mempunyai peran yang strategis bagi masyarakat desa untuk meningkatkan pengetahuan tentang produk hukum desa. JDIH berperan dalam menyediakan kebutuhan dokumen dan informasi hukum terbaru yang dapat diperoleh dengan mudah, cepat dan akurat. Adapun manfaat yang dapat diperoleh jika JDIH dapat dikelola dengan baik antara lain sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum, meningkatkan penyebaran dan pemahaman pengetahuan hukum, memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya serta meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum. Namun sayangnya pengelolaan JDIH di tingkat desa belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari kelengkapan produk hukum desa yang dikelola oleh pemerintah desa tersebut. Oleh karena itu, Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) bermaksud mengadakan Lomba Pengelolaan JDIH Pemerintah Desa sebagai bentuk pembinaan pengelolaan JDIH oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang serta untuk mewujudkan JDIH Desa yang memenuhi standar, bermutu, dan dapat memberikan pelayanan informasi hukum yang dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Kegiatan Lomba Pengelolaan JDIH bagi Pemerintah Desa Tingkat Kabupaten merupakan adopsi/meniru kegiatan lomba yang rutin dilakukan oleh Pusat JDIH Provinsi Jateng dan Pusat JDIH Nasional setiap tahun, dan kami laksanakan dengan pertimbangan bahwa lomba/kompetisi merupakan bentuk pembinaan yang paling efektif karena disamping dapat memberi motivasi/semangat kepada anggota JDIH, juga dapat secara langsung melihat kondisi riil di lapangan serta mengetahui permasalahan/kendala yang dihadapi pengelolaan JDIH oleh anggota JDIH khususnya pemerintah desa.

Pusat JDIH perlu lebih intensif dalam melakukan pembinaan kepada anggota khusus pemerintah desa, karena desa sebagai badan hukum publik mandiri yang dibentuk Undang-Undang dan mempunyai kewenangan dalam menerbitkan produk hukum, pada kenyataannya dalam pengelolaan produk hukum maupun dokumen hukum lain masih banyak yang belum memenuhi standar baik manual maupun digital.

1.9. Tujuan Inovasi Daerah

- a. Mewujudkan JDIH Pemerintah Desa yang memenuhi standar, bermutu dan dapat memberikan pelayanan informasi yang dapat diakses dengan mudah dan cepat.
- b. Memperkenalkan fungsi dan peranan JDIH bagi Pemerintah Desa.

1.10. Manfaat Yang Diperoleh

Masyarakat desa lebih mengenal JDIH sehingga memudahkan dalam pencairan dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya.

1.11. Hasil Inovasi

Pengelolaan JDIH di 15 Pemerintah Desa yang memenuhi standar

1.12. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

05-02-2020

1.13. Waktu Implementasi

12-03-2020

1.14. Anggaran

-

1.15. Profil Bisnis -

1.16. Kematangan

69.00

2. INDIKATOR INOVASI

NoIndikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1. Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah	TIM PENYELENGGARA LOMBA PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TINGKAT PEMERINTAH DESA DAN LOMBA MENULIS ESAI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2020
2. Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	11-30 SDM	TIM PENYELENGGARA LOMBA PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TINGKAT PEMERINTAH DESA DAN LOMBA MENULIS ESAI TENTANG JARINGAN

		DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2020
3. Dukungan Anggaran	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi daerah	DPA SKPD TA 2020 KEGIATAN PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
4. Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi online/ daring	LINK WEB PENGUMUMAN LOMBA PENGELOLAAN JDIH PEMERINTAH DESA TAHUN 2020
5. Bimtek Inovasi	-	Tidak Tersedia
6. Program dan kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	-	Tidak Tersedia
7. Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	SK TIM PENYELENGGARA LOMBA PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TINGKAT PEMERINTAH DESA DAN LOMBA MENULIS ESAI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2020
8. Replikasi	-	Tidak Tersedia
9. Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual	KAK LOMBA PENGELOLAAN JDIH PEMERINTAH DESA TAHUN 2020
10. Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	SK TIM PENYELENGGARA LOMBA PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TINGKAT PEMERINTAH DESA DAN LOMBA MENULIS ESAI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2020
11. Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Email/Media Sosial	AKUN MEDIA SOSIAL JDIH KAB BATANG
12. Penyelesaian Layanan Pengaduan	-	Tidak Tersedia

13. Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor	SURAT DAN DAFTAR HADIR LOMBA PENGELOLAAN JDIH DESA 2020
14. Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	KAK LOMBA PENGELOLAAN JDIH PEMERINTAH DESA TAHUN 2020
15. Online Sistem	-	Tidak Tersedia
16. Kecepatan Inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	LAPORAN LOMBA PENGELOLAAN JDIH DESA 2020
17. Kemanfaatan Inovasi	-	Tidak Tersedia
18. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia
19. Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI LOMBA PENGELOLAAN JDIH PEMERINTAH DESA 2020
20. Kualitas Inovasi Daerah	-	Tidak Tersedia